



**PENEGAKAN HUKUM *BINARY OPTION* DENGAN  
KEBIJAKAN FORMULASI DALAM HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DION AZRIEL  
1910611078**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
JULI  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

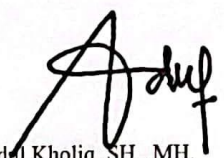
**PENEGAKAN HUKUM *BINARY OPTION* DENGAN KEBIJAKAN  
FORMULASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**DION AZRIEL**  
**1910611078**


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

  
Abdul Kholiq, SH., MH.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Mulyadi, SH, MH.  
NIP. 196311051987031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

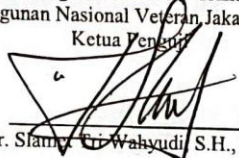
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh:

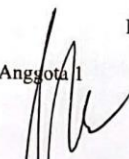
Nama : Dion Azriel  
NPM : 1910611078  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM *BINARY OPTION*  
DENGAN KEBIJAKAN FORMULASI DALAM  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

  
Dr. Slamet Tri Wahyudi S.H., M.H.

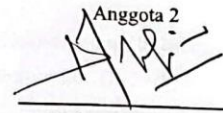
Anggota 1

  
Agus Kurniawan L., S.H., M.H

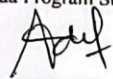
  
Dr. Sunardi, S.H., L.L.M.

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

Anggota 2

  
Mulyadi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.

## BIODATA PENULIS



Nama : Dion Azriel  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 2 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Kesatrian IX, Blok H/7, RT 017/RW  
03, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan  
Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta  
No. Telpon : 081289339282  
Email : [dionazriel@upnvj.ac.id](mailto:dionazriel@upnvj.ac.id)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Refendi Maruli Tua Panggabean  
b. Ibu : Mundarwati

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Marsudirini Jakarta (lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Penuai Bekasi (lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi  
(lulus Th. 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS SMP PENUAI BEKASI
2. MPS PANGUDI LUHUR II SERVASIUS BEKASI
3. Komponen Cadangan (LATSARMIL) 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Dion Azriel

NIM : 1910611078

Tanggal : Jakarta, 21 Juni 2023

Tanda Tangan :



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dion Azriel

NIM : 1910611078

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PENEGAKAN HUKUM *BINARY OPTION* DENGAN  
KEBIJAKAN FORMULASI DALAM HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA\*) mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 21 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Dion Azriel

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hikmat dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PENEKAKAN HUKUM *BINARY OPTION* DENGAN KEBIJAKAN FORMULASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA” dengan maksimal. Tugas akhir yang telah disusun ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memenuhi mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Di dalam pengerjaan penyusunan skripsi ini Penulis telah didukung oleh banyak pihak yang sangat berjasa, maka dari itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. selaku pembimbing tugas akhir atas segala bantuan, bimbingan, saran, arahan, serta semangat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah membantu Penulis merencanakan target perkuliahan tiap semester hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Aji Lukman Ibrahim S.H., M.H. selaku mentor yang telah membantu Penulis dalam menyusun penelitian ini dengan memberikan masukan teori maupun rujukan yang membantu Penulis dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

7. Seluruh Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu Penulis menyelesaikan syarat administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Bapak Refendi Maruli Tua Panggabean dan Ibu Mundarwati selaku orang tua tercinta atas doa dan restu selama penulis menyusun skripsi serta segala pengorbanan yang diberikan, agar Penulis berkesempatan menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Boma Wikan, Muhammad Rifqi Arfan Maulana, dan Ryan Chandra selaku sahabat penulis semenjak awal pendidikan semester 1 (satu) hingga sekarang;
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu; dan
11. Semua pihak yang tentu sangat membantu Penulis dalam Menyusun skripsi yang telah membantu dengan tulus sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan baik.

Dengan demikian Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran yang diberikan agar Penulis dapat menjadi individu yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini Penulis berharap Skripsi dapat membantu, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih

Jakarta, 20 Juni 2023



## ABSTRAK

Praktik *binary option* menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjerumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), padahal hukum positif Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi kebijakan formulasi terhadap praktik *binary option* dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum *binary option* melalui kebijakan formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui KUHP dan UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan *binary option*, meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, serta aset yang ditawarkan merupakan komoditi yang biasanya ditransaksikan pada perdagangan berjangka dengan kata lain praktik ini merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Selain itu, kriminalisasi dimungkinkan dengan menganalisa kriteria atau syarat yang dikemukakan oleh ahli. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di dalam hukum positif Indonesia, secara khusus yakni *adressat*, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, kebijakan formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum *binary option* telah mempunyai ketegasan dasar hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Binary Option*, Kebijakan Formulasi.

## ABSTRACT

*The practice of binary options has become viral because it offers convenience in making profits and is supported by the conditions of Covid 19. Not only that, the emergence of affiliates like Indra Kenz and Doni Salmanan has increasingly attracted people to fall into this fraudulent investment. Reflecting on the indictment filed by the Public Prosecutor, law enforcement still uses Law Number 1 of 1946 (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information (ETI Law), even though Indonesia's positive law has Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading (CFT Law). The purpose of this study is to find out the urgency of formulating policies regarding binary option practices and formulating ideal arrangements into positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on existing laws and regulations. Furthermore, the research results which reveal that binary option law enforcement through policy formulation needs to be carried out considering the condition of legal needs in society and law enforcement through the ETI Law are considered inappropriate. Because binary options imitate derivative contracts and are similar or imitate the way options work, in other words, it is a deviation from the CFT Law. In addition, criminalization is possible by analyzing the criteria or conditions put forward by the expert. Then, it is possible to formulate binary options in terms of the formulation of criminal acts in Indonesian positive law, specifically namely the address, the formulation of the prohibition of acts, and the criminal sanctions. The author also recommends an article to state the ideal arrangement in part d of Article 57 of the CFT Law. Then, the author continues to follow the existing criminal provisions, namely Article 72 of the CFT Law. Thus, policy formulation is possible if viewed from the urgency and the formulation of criminal provisions has been poured into a special law. Therefore, binary option law enforcement has a good legal basis.*

*Keywords: Law Enforcement, Binary Option, Formulation Policy.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	vi
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	8
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Masalah.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Cara Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
<b>A. Literature Review</b> .....	12
<b>B. Tinjauan Teori</b> .....	13
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	13
2. Teori Pembentukan Peraturan Pidana .....	16
3. Teori Pemidanaan .....	18
BAB III .....	21
DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	21
<b>A. Perbandingan putusan kedua afiliator (Indra Kenz dan Doni Salmanan) ...</b>	21
<b>B. Peraturan Yang Selama Ini Dipakai di Indonesia Dalam Penegakan Hukum</b> <b><i>Binary Option.</i></b> .....	24
<b>C. Perihal Kontrak Derivatif, Opsi, dan <i>Binary Option.</i></b> .....	27
BAB IV .....	32

PEMBAHASAN.....	32
<b>A. Urgensi Kebijakan Formulasi <i>Binary Option</i></b> .....	32
<b>B. Pengaturan Ideal <i>Binary Option</i> dalam Hukum Positif di Indonesia</b> .....	47
BAB V .....	58
PENUTUP .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Saran</b> .....	59
LAMPIRAN	